

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk merupakan suatu permasalahan yang sangat sulit untuk di atasi sama halnya dengan kemiskinan. Bagi Negara Indonesia yang merupakan sebagai negara berkembang, pertumbuhan penduduk merupakan masalah yang cukup serius untuk dihadapi karena dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka akan menimbulkan masalah kurangnya kesejahteraan sosial, seperti tidak seimbang antara lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan berdampak terhadap aspek perekonomian dan akan menghambat kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kehidupan masyarakat. Dilansir dari laman detik.com, Indonesia berada di posisi keempat dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk tertinggi setelah Amerika (USA), India, dan urutan pertama adalah China.

Dengan pertumbuhan laju penduduk yang terus meningkat, maka akan menimbulkan beberapa dampak baik sosial, ekonomi, dan lapangan pekerjaan. Permasalahan yang ditimbulkan dengan semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk adalah semakin berkurangnya lapangan pekerjaan, Karena pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan.

Tidak seimbangnya lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja akan berdampak pada aspek lainnya yaitu aspek sosial. Dengan semakin tinggi pengangguran yang ada di Indonesia maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah kriminalitas. Masyarakat yang sudah tidak lagi mampu mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain maka akan melakukan suatu tindakan kriminalitas seperti pencurian dan perampokan. Dampak lain yang ditimbulkan dengan tidak terkontrolnya laju pertumbuhan penduduk adalah masalah lingkungan. Semakin banyaknya kebutuhan akan rumah memaksa mereka untuk merubah lingkungan yang seharusnya mempunyai fungsi penghijauan menjadi perumahan. Dari hal tersebut maka fungsi lahan untuk penghijauan akan berkurang sehingga menimbulkan dampak negatif seperti banjir dan tanah longsor.

Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk tersebut, maka pemerintah pusat membuat program “Keluarga Berencana” dengan slogan “Dua Anak Cukup” melalui lembaga BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Peran pemerintah sangatlah penting untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk haruslah disertai dengan perkembangan kualitas penduduk agar dapat seimbang antara pertumbuhan penduduk dengan kesejahteraan sosial. Menurut

Lakip BKKBN Tahun 2016, dalam melaksanakan tugasnya, BKKBN mempunyai fungsi: (1) Perumusan kebijakan nasional; (2) Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria; (3) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi; (4) Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi; (5) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan (6) Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan atau sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk membentuk keluarga kecil bahagia dengan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah perlu mengintervensi dalam mengatur kelahiran, tetapi tidak mengurangi hak seseorang sesuai dengan tujuan program KB secara umum membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (UU No. 52 Tahun 2009). Dengan terbentuknya program Keluarga Berencana yang memiliki slogan dua anak cukup, diharapkan setiap keluarga hanya memiliki dua anak agar tercapainya kesejahteraan suatu keluarga.

Kabupaten Bantul adalah salah satu wilayah kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan, dengan total jumlah desa 75 dan 933 pedukuhan. Menurut BPS Kabupaten Bantul, total luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 Ha, dengan bermacam-macam jenis mata pencaharian masyarakat diantaranya adalah sebagai petani, PNS, wiraswasta, dan banyak lainnya.

Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Pada awalnya program Keluarga Berencana dijalankan oleh BKKPPKB, namun setelah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Program Keluarga Berencana berada di bawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Dengan adanya program Keluarga Berencana diharapkan dapat menekan angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul.

Menurut laman [harianjogja.com](http://harianjogja.com) pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul selama setahun terakhir dari 2015 sampai 2016 mencapai angka 5000 jiwa yaitu dari 913.870 menjadi 919.440. Menurut Disdukcapil Kabupaten Bantul, sampai dengan semester II 2016 memiliki total jumlah penduduk mencapai

928,676, dengan kenaikan yang cukup banyak tersebut, menjadikan Kabupaten Bantul sebagai kabupaten dengan urutan tertinggi kedua dalam pertumbuhan penduduk yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Kabupaten Sleman. Dengan banyaknya angka jumlah penduduk tersebut, maka akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan masyarakatnya. Dengan banyaknya angka laju pertumbuhan penduduk tersebut, maka akan berdampak pada semakin berkurangnya kesejahteraan bagi masyarakatnya. Jumlah penduduk yang semakin meningkat akan semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, sehingga kebutuhan semakin meningkat.

Ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam implementasi pelaksanaan program dua anak, diantaranya adalah: 1.) Menurut Tatuhe, dkk (2016:4) Dalam pelaksanaan program, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menunggu instruksi dalam pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan kependudukan dalam program Keluarga Berencana disuatu daerah. 2.) Menurut Dewi (2017:101) Banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa “Banyak anak banyak rezeki” sehingga banyak masyarakat yang masih mempercayainya terutama bagi masyarakat awam. Mereka beranggapan bahwa nasib seluruh anak-anak mereka akan dijamin kehidupannya oleh Tuhan, padahal mereka tetap harus berusaha dan bekerja keras agar dapat hidup sejahtera. 3.) Menurut Tatuhe, dkk (2016:4) masih tingginya keinginan masyarakat untuk menambah anak lagi walaupun mereka

sudah memiliki dua anak, hal tersebut sering terjadi karena menurut anggapan mereka belum cukup apabila tidak memiliki anak laki-laki dan perempuan. 4.) Menurut Tricahyani (2016:72) adanya daerah yang masih menganut kepercayaan bahwa semakin banyak anak dalam suatu keluarga maka akan semakin tinggi perekonomian dan kehormatan keluarga tersebut, seperti yang terjadi di Sumatera Selatan.

Menurut laman [bantulkab.com](http://bantulkab.com), pernikahan dini merupakan pernikahan sebelum memenuhi syarat seperti ketentuan UU Perkawinan NO 1/1974 yakni minimal usia 19 tahun untuk putra dan minimal 16 tahun untuk putri. Dilansir dari [tribunjogja](http://tribunjogja), pada tahun 2014 jumlah pernikahan dini di Kabupaten Bantul sebanyak 204 perkara pengajuan pernikahan dini ke Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Walaupun dirasa angka tersebut turun dari tahun 2013 namun masih cukup tinggi untuk Kabupaten Bantul. Sedangkan angka perceraian di Kabupaten Bantul setiap tahun semakin meningkat. Menurut [radarjogja](http://radarjogja), sepanjang tahun 2016 angka perceraian di Kabupaten Bantul sebanyak 1.371 perkara dan meningkat 2,5% dari sepanjang tahun 2015 yaitu 1.363 perkara. Semakin tingginya angka perceraian maka akan berdampak dengan semakin berkurangnya kesejahteraan suatu keluarga.

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Bantul, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Berdasarkan data PKBI DIY, dibandingkan

Kabupaten Sleman dengan jumlah kelahiran pada tahun 2015 sebanyak 110, Kabupaten Bantul jauh lebih tinggi yaitu dengan jumlah angka kelahiran sebanyak 364 pada tahun 2015. Bantul diharapkan dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, maka memungkinkan dapat menurunnya tingkat kesejahteraan dalam suatu keluarga, dikarenakan semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu melalui program Keluarga Berencana yang sesuai dengan program Pemerintah Pusat. Dengan melihat penjelasan tersebut mengenai tingginya pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Bantul, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana Program Keluarga Berencana dalam Pengendalian Penduduk di Kabupaten Bantul?

### **C. Tujuan**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul Tahun 2016
2. Untuk mengetahui bagaimana program Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul tahun 2016

### **D. Manfaat**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Implementasi

Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016 dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.

2. Manfaat Praktis

Mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Bantul mengenai pentingnya pelaksanaan program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

## **E. Kajian Pustaka**

Helwa Septi Tricahyani dalam skripsi yang berjudul “*Peran Humas Bkkbn Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga*”. Pada penelitian ini terfokus pada peran humas BKKBN Sumatera Selatan dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana. Penelitian ini melihat bahwa masyarakat masih banyak yang kurang memahami mengenai program KB, sehingga perlu adanya peran dari lembaga BKKBN dalam mensosialisasikan program KB dan dalam hal ini melibatkan peran humas BKKBN.

Merita Rahma dalam skripsi yang berjudul “*Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Dengan Pelaksanaan Program KB Dinamis/Tim KB Keliling (Analisis Terhadap Implementasi Program KB Dinamis/TKBK Di Kabupaten Pringsewu)*”. Penelitian ini lebih terfokus terhadap bagaimana peran KB Dinamis atau dengan adanya TKBK (Tim KB Keliling) dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini melihat bagaimana partisipasi masyarakat terhadap program KB setelah adanya TKBK (Tim KB Keliling) dalam memudahkan masyarakat dalam melaksanakan program KB.

Stephen Tatuhe, dkk dalam skripsi yang berjudul “*Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan*

*Taulud*)”. Pada penelitiannya, Stephen Tatuhe dkk, hanya terfokus peran lembaga BKKBN Kepulauan Taulud dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Selanjutnya adalah perbedaan lokasi penelitian, di mana penelitian yang dilakukan oleh Stephen Tatuhe dkk berlokasi di Kepulauan Taulud.

Muhammad Rizal dalam skripsi yang berjudul “*Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Partisipasi Pria Dikecamatan Kampar Kiri Hilir )*”. Pada penelitian ini, lebih menekankan pada partisipasi laki-laki dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Kampar Kiri Hilir karena dalam penelitian tersebut partisipasi laki-laki di Kecamatan Kampar Kiri Hilir sangat rendah, sehingga penelitian lebih difokuskan terhadap partisipasi laki-laki.

Tulus Susanto dalam skripsi yang berjudul “*Strategi Pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar)*”. Pada penelitian ini peneliti lebih terfokus bagaimana strategi BKKBN dalam penyuluhan program Keluarga Berencana. Sebagaimana yang tertulis dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat di Kabupaten Karanganyar sangat kurang dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana sehingga dibutuhkan

penyuluhan oleh tim BKKBN untuk memberi pengertian masyarakat tentang program Keluarga Berencana.

Denok Maya Dewi dalam skripsi yang berjudul “*Banyak Anak Banyak Rejeki Vs Dua Anak Cukup Via Program KB Di Kota Batam*”. Dalam penelitian ini menekankan pada bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam menunjang layanan program Keluarga Berencana di Kota Batam, beserta hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Daerah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 beserta solusi yang diberikan.

Setelah melihat beberapa kajian pustaka diatas dapat dibedakan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diatas. Ada beberapa perbedaan yang terlihat antara penulis dengan beberapa peneliti diatas diantaranya adalah, penelitian diatas lebih menfokuskan pada Peraturan Daerah, peran humas, Undang-Undang, peran lembaga dalam mensosialisaikan program KB, partisipasi laki-laki dalam pelaksanaan program KB, sedangkan penulis lebih menfokuskan penelitian terhadap implementasi kebijakan dari program KB dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Selanjutnya adalah perbedaan lokasi penelitian, setelah melihat beberapa penelitian diatas dilakaukan di berbagai daerah di Indonesia diantaranya adalah Lampung, Sumatera Selatan, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kepulauan Taulud, Kota Batam dan Kabupaten Karanganyar. Sedangkan penulis mengambil lokasi di Kabupaten Bantul, DIY. Perbedaan selanjutnya adalah ada

beberapa penelitian diatas yang tidak terfokus pada program KB dan hanya melihat bagaimana peran dari lembaga BKKBNnya saja sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap implementasi program KB.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Implementasi Kebijakan**

#### **a. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Anderson dalam (Winarno , 2014:19) Secara umum istilah kebijakan atau *policy* sering digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Menurut Anderson dalam (Winarno, 2014:21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau permasalahan.

Menurut Rose dalam (Winarno, 2014:20) menyarankan bahwa kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada suatu keputusan tersendiri. Berbeda dengan definisi yang diungkapkan oleh Anderson, dalam definisi ini kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Menurut *Oxford English Dictionary* (dalam Wicaksono, 2014:100), definisi kebijakan dikatakan sebagai *political sagacity* (kebijaksanaan), *statecraft* (keahlian negarawan), *prudent conduct* (kepemimpinan yang bijaksana), *craftiness* (keahlian), *course* (rangkaian) *of action adopted by government, party, etc.*

Menurut Chief J.O Udoji (dalam Rahma, 2016:14), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Adapun menurut Thomas R. Dye (dalam Syafiie, 2013:355) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan).

Menurut Winarno (2014:35), dalam proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus di kaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang berminat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan kedalam beberapa tahap.

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn dalam (Winarno, 2014: 35-37) ada beberapa tahapan dalam kebijakan publik diantaranya adalah:

a) Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahapan ini, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk masuk kedalam agenda kebijakan.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang masuk ke agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap Adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif dari kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik dibuat atas dasar untuk memecahkan masalah yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

c. Implementasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2014:147) implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas

program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148) implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakantindakan) oleh berabagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Grindle (dalam Rahma , 2016:28) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system,*” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik diartikan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuantujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilahpilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-proyek individu adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkaran kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Menurut Winarno (2014: 147) implementasi kebijakan dalam arti yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan

Undang-Undang. Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2014:147) implementasi dipandang secara luas memiliki makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menurut Meter dan Horn (dalam Winarno, 2014:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan untuk menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Edwards (dalam Winarno, 2014:77) mengkaji implementasi kebijakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yakni: Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan empat faktor dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut

saling berpengaruh satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah :

a.) Komunikasi

Secra umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu tranmisi, konsistensi dan kejelasan.

Persyaratan utama dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah mereka yang melaksanakan perintah-perintah dan kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, selanjutnya mereka meneruskan keputusan-keputusan dan kebijakan kepada personil yang tepat sebelum perintah-perintah dan kebijakan tersebut dapat diikuti. Maka dari itu diperlukannya komunikasi yang akurat dan mudah dimengerti bagi personil.

b.) Sumber Daya

Dalam penyampaian perintah-perintah implementasi kebijakan haruslah melalui sumber-sumber yang akurat, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber maka penyampaian perintah-perintah implementasi kebijakankpun tidak efektif. Sumber-sumber yang penting tersebut meliputi: staff yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugasnya, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayananpelayanan publik.

c.) Sikap Pelaksana

Kecenderungan merupakan faktor ketiga dalam pelaksanaan kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika sikap para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

#### d.) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang sering secara keseluruhan dalam melaksanakan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar dan tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Menurut Abidin (dalam Rahma, 2004:44) tidak semua kebijakan berhasil dilakukan secara sempurna, karena pelaksanaan kebijakan pada umumnya memang lebih sukar dari sekedar merumuskannya. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sukar diprediksikan. Selain itu, dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplifikasi yang di dalam pelaksanaannya

tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, dalam kenyataan terjadi “*implementation gap*”, yakni kesenjangan atau perbedaan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan. timbulnya kesenjangan kesenjangan tersebut antara lain disebabkan oleh:

a.) Substansi kebijakan tidak dibutuhkan oleh masyarakat.

Masyarakat sesungguhnya tidak membutuhkan suatu kebijakan tertentu, namun para pengambil kebijakan (*decision maker*) justru memutuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

b.) Kebijakan tidak menguntungkan publik. Suatu kebijakan publik akan ditolak kehadirannya di tengah-tengah masyarakat sebab adanya kebijakan itu tidak memberikan keuntungan sedikitpun yang dapat mereka rasakan. Kecuali hanya menambah beban publik (*public burden*) saja.

c.) Tidak layak. Kebijakan publik akan gagal diimplementasikan di lapangan, bilamana kebijakan tersebut tidak layak, baik dari sisi waktu, biaya maupun kebutuhan.

## **2. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk**

a. Pengertian Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Menurut Siagian (dalam Nastiti, 2017:8) pengendalian merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Subarkah (2006:9) konsep dasar kependudukan dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, migrasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan angkatan kerja, pendidikan dan perubahan kependudukan. Menurut Eldrige (dalam Subarkah, 2006:9) kebijaksanaan kependudukan adalah semua tindakan pemerintah yang mantap (misalnya hukum, peraturan dan program administrasi) yang bertujuan mempengaruhi pertumbuhan, jumlah, distribusi dan komposisi penduduk.

Menurut Rahma (2016:47) pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan mengurangi jumlah penduduk yang secara terus menerus akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya atau perbandingan populasi yang dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam suatu populasi.

b. Tujuan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Proses Pengendalian

Menurut Rahma (2016:47) menyebutkan bahwa pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Jadi, pengendalian pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, yaitu pada umumnya dengan cara mengurangi jumlah angka kelahiran demi tercapainya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk ini dilakukan karena terjadinya suatu pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di suatu negara. Maka dari itu, pemerintah melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk, yaitu karena tingginya angka kelahiran di sebuah negara serta kurang berhasilnya program KB yang diusung oleh pemerintah.

Menurut Hasibuan (dalam Nastiti, 2017:8) pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Hasibuan menyatakan bahwa proses pengendalian meliputi tiga hal yaitu :

a.) Penetapan standar

b.) Pengukuran kegiatan dan

c.) Membetulkan penyimpangan/tindakan korektif.

### **3. Program Keluarga Berencana**

#### **a. Pengertian Program Keluarga Berencana**

Menurut Muhadjir (dalam Yuliana, 2006:138) kependudukan merupakan salah satu titik sentral dalam pembangunan. Jika masalah kependudukan tidak diperhatikan, Indonesia bisa menjadi negara gagal. Karena pertumbuhan ekonomi yang diberikan tidak akan memberikan kesejahteraan karena pertumbuhan ekonomi tersebut akan dimakan oleh penduduk yang jumlahnya semakin tinggi. Menurut Yuliana (2006:138) dengan melihat kecenderungan peningkatan jumlah penduduk saat ini penting dilakukan upaya pengendalian melalui program Keluarga Berencana.

Menurut Subarkah (2006:12) dapat dikatakan sasaran utama yang ada dibalik KB secara mikro adalah membatasi jumlah anak, sedangkan secara makro adalah menghambat laju pertumbuhan penduduk. Menurut Subarkah (2006:12 ) banyak hasil yang positif jika sasaran tersebut dapat dicapai, antara lain adalah bidang kesehatan, perbaikan pendidikan anakanak dan kesejahteraan secara keseluruhan sehingga akan terwujud suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam TAP. MPR NO. 11/MPR/1988 menegaskan bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk terutama dilakukan melalui upaya penurunan tingkat kematian khususnya kematian bayi dan anak. Penurunan tingkat kelahiran terutama dilakukan melalui gerakan Keluarga Berencana yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Program KB di Indonesia pertama kali berdiri pada tanggal 23 Desember 1957 dengan nama PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia). Pada masa orde lama program KB dilaksanakan oleh para sukarelawan dan dilaksanakan secara diam-diam, dikarenakan pada masa kepemimpinan Soekarno anti terhadap program tersebut. Memasuki masa orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto, program KB mulai diakui dan termasuk kedalam salah satu program pemerintah.

Pada Oktober 1968 barulah dibentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional) yang bertugas menjalankan program KB dan bersifat semi pemerintah dan diawasi langsung oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat. LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional) selanjutnya berganti nama menjadi BKKBN (Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional) pada tahun 1970 guna untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk mengikuti program Keluarga Berencana dengan dua anak

cukup. Program KB secara teknis yaitu menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya pembuahan. Pada awal pelaksanaannya program KB tidak dapat berjalan lancar, banyak penolakan dari masyarakat. Untuk mengatasi berbagai penolakan dari masyarakat tersebut maka pemerintah melakukan pendekatan yang intensif, seperti berdialog dengan pemuka agama, dan masyarakat luas.

#### b. Tujuan Program Keluarga Berencana

Menurut buku sumber pendidikan KB BKKBN Jakarta (dalam Subarkah, 2006:11) program Keluarga Berencana Nasional mempunyai tujuan ganda yaitu melaksanakan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera sebagai dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran serta untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Menurut Subarkah (2006:11) program KB merupakan program nasional yang pada dasarnya mempunyai tujuan pokok antara lain:

- a.) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menurunkan tingkat kelahiran
- b.) Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga. Pada pelaksanaannya program ini menggunakan pendekatan kesehatan yang

berorientasi pada pelayanan dan pengenalan kontrasepsi untuk menurunkan angka kelahiran guna menekan laju pertumbuhan penduduk.

## **G. Definisi Konsepsional**

### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah tindakan atau penerapan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok baik pemerintah ataupun swasta dalam mencapai tujuan-tujuan suatu kebijakan yang telah ditetapkan Undang-Undang yang dijadikan konsep dasar atau pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan.

### **2. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk**

Pengendalian pertumbuhan penduduk adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk membatasi jumlah populasi. Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat berupa kegiatan dalam membatasi jumlah kelahiran, pernikahan dini, dan juga mensosialisasikan tentang program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh BKKBN untuk tercapainya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pembatasan pertumbuhan penduduk.

### **3. Program Keluarga Berencana**

Program Keluarga Berencana adalah sebuah program yang dicanangkan pemerintah melalui lembaga BKKBN dalam rangka untuk menekan angka

kelahiran yang semakin tinggi. Program Keluarga Berencana merupakan suatu program untuk merencanakan jarak kelahiran.

## **H. Definisi Operasional**

Dalam definisi operasional berisi indikator-indikator yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian, dan merupakan gambaran untuk mendeskripsikan tentang apa yang akan diteliti.

Menurut Edwards (dalam Winarno, 2014:177) terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, diantaranya adalah: Komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur organisasi. Berikut ini adalah indikator-indikator yang dijadikan tolak ukur peneliti dalam pendeskripsian Implementasi Kebijakan dalam program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan

Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016:

1. Komunikasi dalam konteks pelaksanaan program Keluarga Berencana
  - a. Komunikasi yang baik terjalin antar petugas pelaksanaan program sehingga program dapat berjalan sesuai tujuan.
  - b. Komunikasi yang terjalin baik antara petugas dengan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat semakin tinggi.
2. Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana
  - a. Tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program

- b. Tersedianya para tenaga ahli dalam melaksanakan program
- 3. Sikap Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana
  - a. Sikap pelayanan petugas yang baik terhadap masyarakat
  - b. Tingkat kedisiplinan para petugas dalam melaksanakan program
- 4. Struktur Organisasi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana
  - a. Pemberian wewenang program Keluarga Berencana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sehingga program dapat dijalankan lebih maksimal.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode kualitatif. Secara definisi Menurut Rahma (2016:70), penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Menurut Williams (dalam Moleong, 1989:5) penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan data pada situasi alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh seorang peneliti yang tertarik secara alamiah pula. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk memahami fenomenafenomena yaitu secara sosial dan dari sudut pandang para partisipan.

Menurut Creswell (dalam Rahma, 2016:50-51) menyebutkan bahwa *“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct*

*methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.”*

Maksudnya adalah bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.

Dengan pendekatan metode kualitatif, peneliti akan meneliti fenomena-fenomena yang ada, yaitu tentang bagaimana Program Keluarga Berencana dapat mengendalikan jumlah penduduk yang semakin meningkat, khususnya di Kabupaten Bantul. Harapan penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul dan dapat menuangkannya kedalam hasil penelitian yang dilakukan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2014:218), *purposive* merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah dikarenakan Kabupaten Bantul mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut berada di urutan kedua dengan jumlah penduduk paling tinggi setelah Kabupaten Sleman. Pertumbuhan penduduk secara alami di Kabupaten Bantul lebih tinggi daripada Kabupaten Sleman yang juga diimbangi oleh banyaknya penduduk yang berpindah ke Kabupaten Sleman.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016 ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan. Adapun data primer yang didapat dalam penelitian, yaitu hasil wawancara terhadap orang-orang yang berada di dalam lembaga

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul, serta masyarakat atau aseptor KB.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dapat diperoleh melalui dokumentasi, media elektronik ataupun cetak yang berhubungan dengan program. Adapun data sekunder yang didapat peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah melalui buku, dan juga media elektornik seperti jurnal.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Menurut Esterbeg (dalam Sugiyono, 2016:231) menyatakan bahwa *interview* merupakan pertemuan dua orang untuk dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Stainback (dalam Sugiyono, 2016:232) meyakini bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai informan-informan yang terkait dengan pelaksanaan program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul. Metode wawancara adalah cara mengumpulkan data-data dengan mengajukan berbagai pertanyaan menyangkut penelitian yang akan diteliti terhadap informan

b. Metode Dokumentasi

Pada metode ini menjelaskan bahwa peneliti dapat melihat data atau mendapatkan data dari dokumen-dokumen lembaga/dinas terkait. Dokumentasi tersebut dapat berupa dokumen resmi, arsip, berita baik dari media cetak ataupun online. Adapun data sekunder yang telah didapat peneliti dari metode dokumentasi adalah melalui Lakip BKKBN, website resmi BPS Kabupaten Bantul, dan jurnal-jurnal terkait.

## **5. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2014:246-252) adapun model analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model alir, dimana sebelum peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber maka peneliti sudah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap jawaban yang akan diwawancarai. Apabila

jawaban yang didapatkan dari narasumber dirasa kurang cukup, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai mendapatkan jawaban yang diharapkan.

Menurut Sugiyono (2014:244), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Aktifasi dalam analisis data yaitu meliputi:

*a. Data Reduction (Reduksi Data)*

Menurut Sugiyono (2014:249) reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data yaitu suatu proses merangkum, memilih hal yang dianggap penting, memfokuskan pada suatu tujuan, mencari tema dan jawabannya. Dengan adanya proses reduksi data maka peneliti lebih mudah dalam mengumpulkan data dan memberikan gambaran yang jelas terhadap peneliti.

*b. Data Display (Penyajian Data)*

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:249) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past*”

*has been narrative text*". Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan cara *display* data, peneliti akan lebih mudah dalam memahami yang terjadi, serta dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti.

c. *Conclusion Drawing (verification)*

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:252), langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal pada sebuah penelitian masih bersifat tidak pasti, dan akan berubah apabila ditemukannya bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan awal disertai dengan data yang *valid* dan juga sesuai dengan data yang diperoleh peneliti saat kembali lagi ke lapangan, maka kesimpulan tersebut sudah dapat dikatakan *credible*.

## **J. Sistematika Penulisan**

Adapun susunan sistematika penulisan yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Deskripsi Objek Penelitian: pada bab ini akan membahas mengenai Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul, seperti profil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, struktur organisasi, dan visi misi lembaga.

BAB III Pembahasan: dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian dan analisis data mengenai Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Pada Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016.

BAB IV Penutup: dalam bab IV penutup terdiri dari dua komponen yaitu kesimpulan dan saran, mengenai Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016.